

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

(Studi Kasus Pelaksanaan KKN Tematik Edukasi Keuangan Masyarakat
Universitas Wahid Hasyim Semarang di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

Hasan^{*}, Muhammad Agus Fauzi

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang

^{*}Email: hasan@unwahas.ac.id

Abstrak

Perguruan tinggi memiliki peran penting melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat” di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah yang merupakan model pertama pengintegrasian kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan program peningkatan literasi keuangan masyarakat bekerjasama dengan OJK. Kegiatan KKN ini terwujud dengan melaksanakan tiga tahapan, yaitu tahapan pra-KKN (yang meliputi perijinan serta persiapan logistik dan peserta), tahapan KKN (yang meliputi penerjunan peserta, silaturahmi, survei dan penyebaran kuesioner, sosialisasi literasi keuangan, dan DIKLAT “Sadar Keuangan”), dan tahapan pasca-KKN (Bantuan Papan Informasi Keuangan dan komunikasi pasca DIKLAT). Dalam tempo satu bulan, kegiatan KKN tematik ini berhasil menyelenggarakan 115 program peningkatan literasi keuangan yang menyentuh berbagai elemen komunitas masyarakat.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, KKN Tematik.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki wilayah sangat luas dan penduduk nomor empat terbesar di dunia, menghadapi masalah serius terkait banyaknya penduduk yang belum memahami masalah keuangan. Dengan kata lain, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh masih sedikitnya masyarakat yang bersentuhan dengan lembaga keuangan maupun produk keuangan.

Berdasarkan survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang tergolong *well literate*. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 22 orang dari (100 responden) yang memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan serta produk dan jasanya. Termasuk juga manfaat, risiko serta hak dan kewajibannya.

Tabel 1. Indeks Literasi Keuangan Sektor Jasa keuangan

	Perbankan	Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Dana Pensiun	Pasar Modal	Pegadaian
<i>Well Literate</i>	21,80 %	17,84 %	9,80 %	7,13 %	3,79 %	14,85 %
<i>Sufficient Literate</i>	75,44 %	41,69 %	17,89 %	11,74 %	2,40 %	38,89 %
<i>Less Literate</i>	2,04 %	0,68 %	0,21 %	0,11 %	0,03 %	0,83 %
<i>Not Literate</i>	0,73 %	39,80 %	72,10 %	81,03 %	81,03 %	45,44 %

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2013)

Salah satu penyebab minimnya akses keuangan oleh masyarakat adalah literasi keuangan yang masih rendah. Literasi keuangan adalah kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mensintesis segala sesuatu yang terkait dengan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidence*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif mulai tahun 2011 untuk mengatasi masalahnya minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Inklusi keuangan adalah kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan, baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Berbagai kegiatan di dalamnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan.

Komitmen ini secara formal juga terlihat pada tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi pengawas bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Salah satu tugas OJK adalah perlindungan konsumen dan masyarakat pada jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Salah satu kegiatan utama untuk kepentingan ini adalah edukasi keuangan yang baik dan masif di seluruh wilayah Indonesia.

Edukasi keuangan, selain menjadi komitmen OJK, juga menjadi salah satu komitmen lembaga pendidikan tinggi yang berprinsip pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), sebagai salah satu perguruan tinggi yang berlokasi di Semarang, juga memiliki komitmen tersebut. Komitmen ini ditunjukkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Universitas Wahid Hasyim pada 25 Juni 2013 dengan Nomor: PRJ-08/D-01/2013; 745/B-07/UWH/IX/2013. Adapun isi nota ini adalah tentang Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Salah satu bentuk realisasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang mengangkat tema besar “Edukasi Keuangan Masyarakat”. KKN ini telah dilaksanakan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2013 dan menjadi KKN tematik Edukasi Keuangan Masyarakat pertama di Indonesia yang bersinergi dengan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Artikel ini merupakan paparan studi kasus peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui tridarma perguruan tinggi dengan model KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat”.

Tujuan

Tujuan pengabdian KKN tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat” ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat pada jasa keuangan dan perluasan akses pada lembaga keuangan,
2. Menginisiasi model pengembangan literasi keuangan masyarakat yang mengintegrasikan program pemerintah (OJK) dengan tri dharma perguruan tinggi.
3. Lebih mendekatkan perguruan tinggi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada masyarakat melalui program-program riil yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam persoalan keuangan.

Tinjauan Pustaka

Literasi Keuangan

Lusardi dan Mitchell (2007) mengartikan *financial literacy* sebagai pengetahuan keuangan yang bermanfaat untuk mencapai kesejahteraan. Sementara itu, Sina dan Nggili (2012) menyebutkan bahwa Danes dan Hira (1987) serta Chen dan Volpe (1998) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan (*money management knowledge*). Sementara itu, Krishna dkk.(2010) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya.

Di Indonesia, tanggung jawab peningkatan literasi keuangan masyarakat dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah lembaga negara yang terbentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011. Lembaga ini memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu (1) menyelenggarakan sektor keuangan yang adil, transparan dan akuntabel, (2) mewujudkan pertumbuhan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil serta (3) melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peningkatan literasi keuangan masyarakat termasuk ke dalam program OJK di bidang perlindungan terhadap konsumen.

Prabowo (2013) menyebutkan bahwa peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen bertujuan untuk meminimalkan informasi asimetris, transparansi dan pengungkapan informasi

mengenai biaya, risiko dan manfaat produk serta layanan keuangan. Hatta (2012) menuturkan hal serupa ketika menyebutkan bahwa keberadaan OJK dibutuhkan sebagai perangkat hukum dan pengawasan sistem keuangan yang mampu meminimalisir potensi permasalahan asimetri informasi.

Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana *agent* mempunyai informasi lebih banyak tentang perusahaan dan prospek di masa yang akan datang daripada informasi yang diketahui *principal*. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada *agent* untuk menggunakan informasi yang diketahuinya guna memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha memaksimalkan kemakmurannya sendiri. Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya *moral hazard* berupa usaha untuk melakukan *earning management* (Wisnumurti, 2010).

Anindita (2012) memaparkan bahwa ekonomi informasi merupakan aspek fundamental dari hubungan kontrak. Efek dari format kontrak ketika salah satu pihak mempunyai atau akan mempunyai suatu informasi memiliki keuntungan yang lebih daripada pihak lain sehingga hubungan kontrak menjadi tidak efisien, atau dengan kata lain *pareto optimum* tidak dapat terjadi. Apabila *pareto optimum* atau *pareto efisien* tidak dapat terjadi maka berarti ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam teori ekonomi, asimetri informasi merupakan salah satu penyebab kegagalan pasar (*market failure*), dimana tidak samanya informasi antara kedua belah pihak (misalnya pembeli dan penjual) menyebabkan salah satu pihak dapat dirugikan. Dalam praktek pemasaran, asimetri informasi sering terjadi karena salah satu pihak tidak mengetahui harga, kualitas atau tipe dari pembeli dan penjual sehingga kesepakatan harga yang terjadi tidak efisien (Anindita, 2012).

Campbell (2006) menjelaskan bidang kajian keuangan rumah tangga yang berfokus pada perbedaan (diskrepansi) antara perilaku yang seharusnya memaksimalkan kesejahteraannya dengan perilaku yang senyatanya dilakukan. Perbedaan ini lebih spesifik disebutnya sebagai kesalahan-kesalahan investasi (*investment mistakes*). Kesalahan investasi ini lebih banyak terjadi pada rumah tangga yang miskin dan kurang terdidik. Gabaix dan Laibson (2006) memperlihatkan adanya fenomena dimana perusahaan cenderung untuk menyembunyikan informasi dari konsumennya dan menyebutkan fenomena ini dengan keseimbangan terselubung (*shrouded equilibrium*). Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya eksploitasi perusahaan pada konsumen yang mengalami rabun keuangan (*consumer myopia*), dan di sisi lain konsumen yang canggih secara keuangan (*sophisticated consumer*) mengeksploitasi perusahaan untuk keuntungan mereka. Kedua eksploitasi inilah yang disebut keseimbangan terselubung. Dua penelitian di atas memperlihatkan dampak negatif adanya asimetri informasi pada keuangan rumah tangga. Rumah tangga yang kurang terinformasi keuangan mengalami masalah-masalah keuangan, seperti kemiskinan dan menanggung biaya keuangan yang lebih besar.

Asimetri informasi sering terjadi pada jasa keuangan di Indonesia. Otoritas jasa Keuangan (2013) mencatat bahwa dalam rentang waktu Januari-Juni 2013, telah ada 1.375 konsumen yang menghubungi *Financial Costumer Care* (FCC) Otoritas Jasa Keuangan. Dari angka tersebut, 73 persen atau sekitar 1.009 konsumen meminta informasi, 18 persen atau 243 konsumen melakukan pengaduan dan selebihnya atau 129 konsumen menyampaikan informasi. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat memerlukan edukasi keuangan.

Objek Sasaran

Kecamatan Mranggen merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling padat di wilayah Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2010 saja, jumlah penduduk di kecamatan ini telah mencapai 158.882 jiwa. Secara rinci, data jumlah penduduk Kecamatan Mranggen di masing-masing desa pada tahun 2010 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Mranggen Tahun 2010

DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1 Banyumeneng	4.195	3.953	8.148
2 Sumberejo	3.787	3.986	7.773

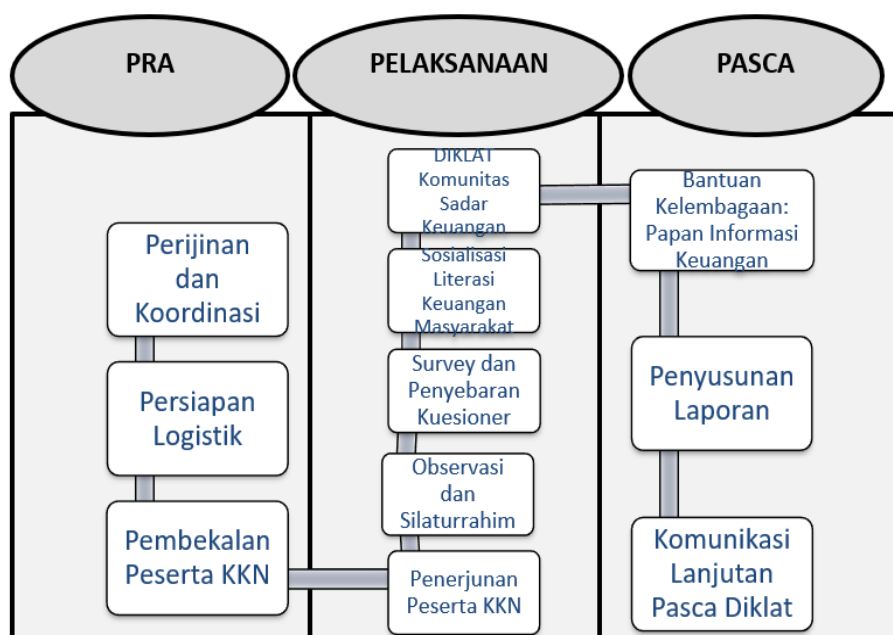
	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
3	Kebonbatur	8.352	8.271	16.623
4	Batursari	18.259	18.628	36.887
5	Kangkung	3.441	3.520	6.961
6	Kalitengah	2.187	2.226	4.413
7	Kembangarum	4.769	4.730	9.499
8	Mranggen	6.880	6.969	13.849
9	Bandungrejo	3.961	4.445	8.406
10	Brumbung	2.658	2.724	5.382
11	Ngemplak	1.697	1.614	3.311
12	Karangsono	2.689	2.757	5.446
13	Tamansari	1.688	1.733	3.421
14	Menur	2.062	2.055	4.117
15	Jamus	1.894	1.975	3.869
16	Wringinjajar	3.838	3.782	7.620
17	Waru	1.971	1.892	3.863
18	Tegalarum	2.517	2.463	4.980
19	Candisari	2.114	2.200	4.314
	JUMLAH	78.959	79.923	158.882

Sumber : BPS Kabupaten Demak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat”—sebagai media untuk menguatkan literasi keuangan masyarakat—difokuskan secara intensif pada 10 desa di Kecamatan Mranggen yang sebelumnya telah menjadi desa binaan Unwahas. Pada tahun sebelumnya, Unwahas telah melakukan KKN di 10 desa tersebut. Hanya saja, kegiatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya lebih dititikberatkan pada pengembangan potensi di masing-masing desa. Hal ini tentu berbeda dengan kegiatan KKN Tematik, yang fokus kegiatannya adalah pada edukasi keuangan masyarakat. Adapun 10 desa yang dimaksud adalah Candisari, Jamus, Karangsono, Kembangarum, Menur, Ngemplak, Tamansari, Tegalarum, Waru dan Wringinjajar.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat” ini dilaksanakan secara sistematis dan bertahap. Rangkaian tahapan tersebut secara ringkas digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Metode Pelaksanaan KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat”

a. Tahap Pra-Pelaksanaan

Tahapan ini meliputi :

1. Perijinan dan Koordinasi

Secara prosedural, tahap ini dimulai dari Pemerintah Kabupaten Demak, khususnya Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), dan dilanjutkan pada tingkat kecamatan dan desa untuk pelaksanaan teknis lebih lanjut.

2. Persiapan Logistik

a. Persiapan logistik meliputi pembuatan buku pedoman KKN Tematik, kelengkapan peserta dan panitia, serta bahan pendataan dan sosialisasi masyarakat.

b. Pembagian peserta (mahasiswa) menjadi 10 kelompok yang disebar di 10 desa sasaran.

3. Pembekalan Peserta KKN

Pembekalan peserta KKN dilaksanakan selama tiga hari. Selama tiga hari ini, mahasiswa dibekali dengan materi-materi umum untuk pelaksanaan KKN, seperti karakteristik KKN tematik, karakteristik masyarakat, lokasi objek sasaran dan dinamika kelompok. Selain materi umum tersebut, juga diberikan materi tematik, yaitu: (1) karakteristik, layanan, dan produk lembaga Keuangan (konvensional dan syariah); (2) hak dan kewajiban konsumen lembaga keuangan; (3) perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga; (4) peran, fungsi dan tugas OJK; (5) karakteristik masyarakat sasaran; (6) pendekatan kelompok masyarakat; dan (6) metode survey dan sosialisasi. Adapun narasumber yang dihadirkan dalam pembekalan ini terdiri dari perwakilan OJK, perwakilan kecamatan, tenaga ahli, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Panitia KKN Tematik.

b. Tahap Pelaksanaan

1. Penerjunan

Penerjunan dilakukan pada tingkat desa. Peserta dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok yang kemudian diterjunkan pada 10 desa binaan yang ada di Kecamatan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Peserta yang mengikuti KKN tematik ini adalah 83 orang. Kesemuanya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Para peserta ini dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing ditugaskan pada satu desa, sehingga jumlah anggota per-kelompok adalah 8-9 mahasiswa. Kepengurusan di tiap desa dipimpin oleh Koordinator Desa (Kordes). Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan, koordinasi antar desa dan komunikasi dengan panitia/kecamatan, maka dibentuklah kepengurusan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator Kecamatan (Korcem).

2. Observasi dan Silaturahmi

Mahasiswa peserta KKN selanjutnya mencari data dan informasi yang relevan melalui tokoh masyarakat baik tingkat desa maupun di bawahnya (PKK, LKMD, Karang Taruna, RT/RW maupun kumpulan masyarakat sejenis). Informasi ini digunakan untuk persiapan tahap sosialisasi kepada masyarakat, baik kepada komunitas maupun rumah tangga secara langsung. Silaturahmi ini penting dilaksanakan untuk mendapatkan informasi penting, ijin untuk mengikuti kegiatan komunitas dan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat.

3. Sosialisasi Edukasi Keuangan

Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan-pertemuan warga, baik di tingkat desa maupun tingkat di bawahnya. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri, ataupun dengan partisipasi dosen/tenaga ahli. Sosialisasi diarahkan dengan pendekatan dialogis mengenai keuangan rumah tangga, fungsi dan peran OJK dan lembaga keuangan. Selain itu, juga dilakukan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan literasi keuangan. Pertemuan dan sosialisasi ini juga dimanfaatkan untuk sosialisasi kegiatan lanjutan termasuk pendidikan terprogram.

4. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Komunitas “Sadar Keuangan”

Pendidikan dan pelatihan (diklat) ini dilakukan selama dua hari di tingkat kecamatan. Peserta pelatihan adalah empat puluh orang dengan satu kali penyelenggaraan. Semua peserta yang hadir telah mewakili semua desa yang ada. Setelah pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan, dibentuklah suatu komunitas yang disebut dengan “Komunitas Sadar Keuangan” yang berfungsi sebagai agen pemberi dan penyampai informasi dan komunikasi lebih lanjut untuk keberlanjutan program di masa yang akan datang.

c. Pasca pelaksanaan

Pasca pelaksanaan KKN Tematik, ada upaya keberlanjutan (*sustainability*) dari program edukasi keuangan ini, yaitu:

1. Bantuan Kelembagaan: Papan Informasi Keuangan

Papan informasi keuangan diberikan kepada Kecamatan Mranggen dan masing-masing desa objek KKN. Papan ini berfungsi sebagai media penempelan informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat. *Background* papan ini adalah poster yang tampilannya di-*design* berisi tentang ajakan bersikap bijak terhadap uang, penjelasan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kontak layanan informasi OJK.

2. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan oleh panitia berdasarkan kompilasi laporan yang disusun oleh mahasiswa ditambah dengan data dan informasi tambahan yang ada. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut di masa yang akan datang.

3. Komunikasi Lanjutan Pasca-DIKLAT

Pasca kegiatan, komunikasi dan *sharing* informasi tetap dilakukan melalui media komunikasi dan informasi (seperti telepon/HP, media sosial, internet, dan *mailing list*) maupun kunjungan dalam bentuk acara lain. Komunikasi dan tindak lanjut ini akan difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim.

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KKN oleh mahasiswa diawali dengan proses identifikasi terhadap komunitas-komunitas potensial yang dapat digunakan sebagai wahana sosialisasi dan bersilaturahmi ke tokoh masyarakat. Setelah itu, mahasiswa melaksanakan program-program sosialisasi dengan berbagai bentuk sesuai dengan kondisi di masing-masing desa dan komunitas sasaran. Tiap kelompok di masing-masing desa juga diwajibkan mengumpulkan data survei literasi keuangan terkait lembaga keuangan. Masing-masing desa diberi kuota survei sebanyak 100 responden. Pada tingkat Kecamatan, dilakukan pula Pelatihan Literasi Keuangan kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan delegasi PKK yang mewakili masing-masing desa di Kecamatan Mranggen. Peserta pelatihan ini diharapkan dapat meneruskan pemahaman keuangan kepada masyarakat dan ibu-ibu PKK yang ada di tiap desa dan mendukung keberlanjutan program edukasi keuangan di kemudian hari.

KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat” telah menghasilkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga lebih mengenal lembaga keuangan. Melalui kegiatan ini, didapatkan juga data mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap lembaga keuangan melalui survei yang dilakukan pada 1000 responden yang mewakili 10 desa di Kecamatan Mranggen.

Secara keseluruhan, KKN tematik ini berhasil menyelenggarakan 115 kegiatan edukasi keuangan hanya dalam tempo 1 bulan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat kecamatan dan desa. Tabel 3 di bawah ini memperlihatkan ragam kegiatan yang telah dilakukan pada masing-masing tingkatan tersebut.

Tabel 3. Rangkuman Kegiatan KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat”

No.	Jenis Kegiatan	Komunitas Sasaran
A. Kegiatan di Tingkat Kecamatan		
1	Silatullah OJK	Tokoh masyarakat se-Kecamatan Mranggen
2	Diklat Literasi Keuangan	Delegasi dari 19 desa se-Kecamatan Mranggen
B. Kegiatan di Tingkat Desa		
3	Penyuluhan tentang OJK	Warga, perangkat desa, komunitas pengajian, PKK
4	Gerai OJK	Balai Desa
5	Simulasi Mini Bank	Siswa SD
6	Sosialisasi Perbankan	Perangkat desa, warga, guru, UMKM
7	Sosialisasi Perbankan Syariah	Perangkat desa, warga, UMKM, komunitas pengajian
8	Sosialisasi Asuransi	PKK, Karang Taruna
9	Sosialisasi Pasar Modal	Karang Taruna, UMKM, warga
10	Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga	Warga, Ibu-Ibu PAUD
11	Perencanaan Keuangan Masa Depan	Karang Taruna
12	Manajemen Keuangan Desa	Perangkat desa
13	Pengelolaan Keuangan UMKM	Pelaku UMKM
14	Penyuluhan Keuangan “Hati-Hati, Investasi Bodong...!!!”	Kelompok tani, UMKM, perangkat desa
15	Pendidikan Menabung Dini	Siswa TK dan SD
16	Jalan Sehat “Sadar Keuangan”	Warga
17	Lomba Menggambar dan Mewarnai “Mari Mewarnai Keuangan Indonesia”	Siswa PAUD, TK dan SD
18	Festival Anak “Cerdas Keuangan”	Siswa TK, SD, dan santri pondok pesantren

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kegiatan tridarma perguruan tinggi dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan KKN Tematik sangat cocok menjadi program yang relevan dengan tujuan ini.

Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat” di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dapat mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pada sisi pendidikan, kegiatan ini dapat mendidik mahasiswa untuk terjun langsung mengurangi kekurangan informasi dan literasi keuangan masyarakat. Mahasiswa dapat belajar melakukan identifikasi masalah (kegiatan penelitian terapan) sehingga mereka dapat menyusun program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada bidang penelitian, perguruan tinggi dapat mendapatkan database mengenai literasi keuangan masyarakat dan potensi-potensi komunitas, kader dan lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang dapat menjadi bahan penelitian menarik penelitian sivitas akademika. Pada sisi pengabdian masyarakat, sangat jelas bahwa KKN Tematik Edukasi Keuangan Masyarakat menjadi sarana pengabdian masyarakat yang efektif dan efisien untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang tentu saja masih terdapat berbagai hal yang perlu ditingkatkan. Sebagai kegiatan

pertama, KKN Tematik ini dapat menjadi model yang dapat dilakukan dengan lebih terencana dan sistematis. Kunci sukses kegiatan ini ada pada manajemen program dengan mensinergikan berbagai potensi dan sumber daya dari berbagai pihak terkait. Keikutsertaan lembaga-lembaga keuangan pada KKN Tematik Edukasi Keuangan Masyarakat dapat menjadi potensi yang dapat meningkatkan keefektifan program. Jaringan dan akses yang dimiliki, seharusnya dapat digunakan sebagai pengawalan keberlanjutan dprogram pasca acara. Termasuk kader-kader keuangan masyarakat yang telah dibina dan dilatih pada “Pelatihan Sadar Keuangan” untuk menyebarkannya secara masif kepada rumah tangga masyarakat yang lain. Potensi-potensi komunitas dan lembaga keuangan yang telah ada hendaknya dapat menjadi katalisator peningkatan dan keberlanjutan literasi keuangan masyarakat. Database yang dimiliki dapat menjadi sarana lebih lanjut untuk bank data penelitian-penelitian lebih lanjut. Untuk itu, dukungan pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah daerah setempat sangat berperan strategis mendorong kegiatan-kegiatan ini mendapat dukungan lebih masif dan efektif.

Meskipun kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2013 lalu, edukasi keuangan masyarakat akan tetap relevan dilaksanakan. Relevansi dan adaptasi dengan kondisi waktu dan situasi terkini, seperti adanya Pandemi Covid-19 menuntut adanya penyesuaian kegiatan jika KKN Tematik ini dilakukan kembali. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan terutama mencegah kerumunan, dapat diatasi dengan menggunakan teknologi informasi dan media pertemuan berbasis internet, seperti Google-meet, Zoom-Meeting, dan platform sejenis. Untuk itu, diperlukan penguatan akses internet yang memadai dan murah untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Hal ini juga dapat dikolaborasikan dengan bank dan lembaga keuangan yang telah didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Referensi

- Anindita, R. 2012. Pemasaran Hasil Pertanian: Asimetri Informasi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Campbell, John Y. 2006. “Household Finance”. *The Journal of Finance* Vol. LXI, No. 4 August 2006, pp.1553-1604
- Gabaix, X., dan Laibson, D. 2006. “Shrouded Attributes, Consumer Myopia, and Information Suppression In Competitive Markets”. *Quarterly Journal of Economics* 121, pp.505-540
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Edukasi Konsumen. Agustus. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Edukasi Konsumen. November. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Krishna, R.R. dan Sari, M. 2010. Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education*. Bandung.
- Lusardi, A. dan Mitchell, O.S.. 2007. “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education”. *Business Economics*. January 2007. Pp.35-44
- Prabowo, A. 03 September 2013. OJK Siapkan Dua Program Perlindungan Konsumen. www.tempo.co.
- Sina, P.G. dan Nggili, R.A.. 2012. Apakah Kamu Yakin Memiliki Literasi Keuangan yang Tinggi? UKSW. Salatiga.
- Wisnumurti, A. 2010. Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Hubungan Asimetri Informasi dengan Praktik Manajemen Laba. Universitas Diponegoro. Semarang.